



Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Abdul Heri Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Heriabdulheri94@gmail.com +6285822523849	ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 3, Desember 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Supardal Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta	

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Heri, A., & Supardal (2024) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Arus Jurnal Pendidikan*, 4 (3), 1376-1388.

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendorong kemajuan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kalurahan Pagerharjo, Kabupaten Kulon Progo. Fokus utama penelitian ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi pembangunan, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat. Data dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk observasi dan wawancara. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan Pagerharjo sudah cukup optimal. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan, yang mencerminkan kesadaran dan komitmen mereka terhadap kemajuan Kalurahannya. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam tahap perencanaan, tetapi juga aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi agar partisipasi masyarakat dapat lebih maksimal. Faktor-faktor seperti kurangnya Sumber Daya Manusia dan keterbatasan Anggaran yang memadai dapat memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan pemilihan program sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan, Desa

Abstract

This research is motivated by the importance of community involvement in promoting village development. The study aims to explore community participation and the factors influencing development in Kalurahan Pagerharjo, Kulon Progo Regency. The main focus of the research includes planning, implementation, utilization, and evaluation of development, as well as analyzing the supporting and inhibiting factors in community participation. Data were collected through various methods, including observation and interviews. The analysis was conducted using a qualitative descriptive approach, aimed at providing a clear picture of the issues under investigation. The results indicate that community participation in development in Kalurahan Pagerharjo is quite optimal. This is evidenced by the active involvement of the community in various aspects of development, reflecting their awareness and commitment to the progress of their village. The community is not only involved in the planning stage but also actively participates in the implementation and evaluation of development programs. However, there are still challenges and obstacles that need to be addressed to maximize community participation. Factors such as a lack of human resources and limited adequate funding can affect the level of community engagement. Therefore, efforts to enhance community capacity and program selection are crucial to support the success of sustainable development.

Key Words: Participation, Development, Village

A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan aspek yang sangat penting dalam kemajuan berbangsa dan bernegara. Ihtwalnya pembangunan menjadi salah satu cita-cita bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Cita-cita ini kemudian dimuatkan dalam berbagai kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna mengimplementasikan tujuan tersebut. Namun, dalam kenyataan yang kita temui di Indonesia masih banyak kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan, terlebih pada pemerintah desa. Indonesia dengan kondisi geografis yang menyebar diseluruh Nusantara menjadi faktor utama dalam pemerataan pembangunan. Selain kondisi geografis juga penyebaran penduduk yang tidak merata antara daerah satu dengan daerah lainnya menjadi faktor kunci tidak mudah dalam pemerataan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan satu diantara upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam implementasi menggapai cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan ini termuat dalam pembukaan UU Dasar 1945 alinia ke empat 'keadilan sosial'. Penyelenggara pembangunan daerah di Indonesia berlandaskan pada UU Dasar 1945 melalui prinsip otomi darah pasal 18. Dalam prinsip otonomi daerah, bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan otonomi secara maksimal, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang sebagai urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Kendati demikian kesenjangan antar wilayah di Indonesia masih saja terjadi. Terutama antara yang di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Bahwa kita melihat perbedaan yang sangat signifikan terutama dalam pembangunan. Kholik, (2020) kesenjangan pembangunan adalah masalah kompleks yang dihadapi oleh Indonesia. Beberapa bentuk kesenjangan yang paling menonjol di negara ini meliputi kesenjangan antar daerah, antar sektor, antara wilayah di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia, serta antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan pemerintahan pusat di daerah.

Sebagai bentuk evaluasi dan turunan dari peraturan pemerintah kemudian hadir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang Mengatur tentang otonomi daerah yang luas, di mana semua urusan pemerintahan adalah urusan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sistem pembiayaan pemerintahan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara

jelas mengharuskan bahwa dalam transisi dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju desentralistik, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan harus dapat mengarahkan berbagai kebijakan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah serta pembangunan.

Pembangunan daerah dalam hal ini adalah pembangunan desa. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, serta hak asal-usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat. Secara konseptual, pembangunan desa bertujuan untuk mempercepat kemajuan di berbagai sektor guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta berupaya menciptakan komunitas yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. (Purwaningsih, 2008).

Menurut Purwaningsih Masalah pembangunan desa selalu terkait dengan partisipasi ketenagakerjaan (kesenjangan dalam lapangan kerja), akses dan kesempatan terhadap faktor produksi (kesenjangan dalam keseragaman), serta informasi yang berhubungan dengan pasar (kesenjangan informasi). Purwaningsih juga menyebutkan permasalahan pembangunan desa antara lain:

1. Kemiskinan, Tujuan pembangunan adalah untuk mengatasi kemiskinan. Namun, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Di desa, kemiskinan juga sering dipengaruhi oleh bias gender, di mana wanita dianggap sebagai kelompok yang lebih lemah.
2. Kesenjangan Pendapatan, Kesenjangan pendapatan antara petani miskin dan petani kaya semakin lebar, dengan pendapatan petani miskin yang semakin menurun sementara petani kaya semakin makmur. Kesenjangan juga terlihat dalam kepemilikan lahan pertanian, di mana semakin banyak petani yang memiliki lahan kurang dari 0,25 hektar dari tahun ke tahun.
3. Kegagalan Transformasi, Kegagalan dalam transformasi ekonomi terjadi karena strategi industrialisasi yang tidak terarah dan mengabaikan sektor pertanian. Penurunan keuntungan dari hasil pertanian disebabkan oleh kenaikan harga produksi dan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan peningkatan hasil panen.
4. Penurunan Kelembagaan Lokal, Kelembagaan lokal di masyarakat desa mengalami kemerosotan. Pergeseran nilai dan persepsi di antara anggota masyarakat terkait alokasi sumber daya dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Mereka yang merasa tersisih dan tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka cenderung mengeksploitasi sumber daya alam di sekitarnya.

Pembangunan desa merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat pedesaan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memperkuat struktur sosial. Desa sebagai unit administratif terkecil memiliki potensi besar untuk berkembang jika diberdayakan dengan efektif. Keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan.

Menurut Leokman Soetrisnoj (Purwaningsih, 2008) partisipasi dalam pembangunan disebutkan bahwa pertama, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Kedua, untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu ada perubahan dalam cara pandang pemerintah terhadap pembangunan. Ketiga, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan sikap toleran dari aparat pemerintah terhadap kritik dan gagasan alternatif yang muncul di masyarakat akibat dinamika yang terjadi, karena kritik dan ide-ide alternatif tersebut merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pembangunan desa mengadopsi model partisipatif. Ini adalah suatu sistem manajemen pembangunan yang melibatkan masyarakat melalui musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Pasal 5 Permendagri No. 66 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pembangunan partisipatif memiliki karakteristik seperti perencanaan yang melibatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan

kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, sementara partisipatif mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa desa atau kelurahan adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas, yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan adat istiadat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partisipasi masyarakat dalam berperan aktif mendorong pembangunan masih sangat terbatas yang dipengaruhi oleh indikasi-indikasi yang sudah mulai tertanam dalam diri masyarakat. Mulai dari indikasi partisipasi pemikiran, keuangan hingga pelaksanaan. Dari segi pemikiran masyarakat tentu punya kemauan untuk mengubah sistem pembangunan yang lebih maju. Tetapi karena adanya beberapa oknum dari pemerintah desa maupun pedukuhan yang kadang kala tidak sepemahaman dengan masyarakat, sehingga masyarakat pemikir-pemikir ini menjadi tidak fokus atau bahkan tidak mau ikut campur. Dilihat dari segi keuangan, masyarakat yang sudah terbiasa dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga ketika ada kegiatan maupun pembangunan yang memerlukan bantuan dari masyarakat, masyarakat sudah terbiasa dengan mindset bahwa ketika ada kegiatan maupun pembangunan sudah bisa dipastikan bahwa ada anggaran yang sudah disiapkan. Dari segi pelaksanaan, merujuk pada partisipasi dan gotong-royong yang mulai memudar disebabkan oleh waktu yang terbatas, juga pekerjaan yang tidak menentu dan tidak kalah pentingnya bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah menjadi pembatas dalam pelaksanaan partisipatif masyarakat.

Konsep pembangunan partisipatif menekankan bahwa masyarakat yang terlibat aktif akan lebih memiliki rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap hasil pembangunan, sehingga program pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih berkelanjutan.

B. Metodologi

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang fokus pada pengamatan dan analisis terhadap fenomena alami. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yang mendasarinya adalah berfokus pada perolehan pemahaman yang alamiah dan naturalistik. (Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S., 2021:30).

2. Partisipan

Peneliti memilih partisipan dari masyarakat yang merupakan asli penduduk di kalurahan Pagerharjo dan rata-rata umurnya diatas 40 tahun. Peneliti menganggap bahwa mereka asli penduduk Pagerharjo akan memberikan informasi yang lebih akurat. Selain masyarakat, pamong kalurahan juga menjadi informasi tambahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dan wawancara. Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta evaluasi pembangunan. Adapun teknik wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kalurahan Pagerharjo.

4. Instrument

Peneliti sebagai instrumen kunci, peneliti sendiri memainkan peran sentral dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya menggunakan alat atau metode, tetapi juga mengandalkan kemampuan, pemahaman, dan pengalaman pribadi untuk menghasilkan data yang relevan dan mendalam

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikemukakan oleh (Huberman, 1992), yaitu: (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, dan (3) Penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tanggapan masyarakat terkait kegiatan perencanaan. Selanjutnya, data yang telah dikelompokkan akan

disajikan berdasarkan topik penelitian. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil interpretasi setelah data disajikan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Kalurahan Pagerharjo terletak di Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan koordinat 07°40'18" LS dan 110°07'52" BT. Luas wilayahnya mencapai 1.069,5115 hektar, yang mencakup sekitar 16,46% dari total luas Kapanewon Samigaluh. Sebagian besar wilayah Pagerharjo terdiri dari pegunungan, dengan area pegunungan mencapai sekitar 1.037 hektar, sementara sisa wilayahnya adalah dataran rendah. Kalurahan ini berada pada ketinggian antara 600 hingga 700 meter di atas permukaan laut.

Luas wilayah Kalurahan Pagerharjo terbagi sebagai berikut: 108,4500 hektar untuk sawah, 351,2335 hektar untuk pemukiman, 123,7200 hektar untuk hutan rakyat/perkebunan, 0,5000 hektar untuk perkantoran, 3,2060 hektar untuk makam, dan 482,0000 hektar untuk kategori lain termasuk sungai.

Secara administratif, Kalurahan Pagerharjo terdiri dari 1.550 Kepala Keluarga (KK), 87 Rukun Tetangga (RT), 43 Rukun Warga (RW), dan 20 Padukuhan. Padukuhan-padukuhan tersebut meliputi Padukuhan Separang, Sarigono, Jobolawang, Sinogo, Ngaglik, Ngentak, Ngemplak, Plono Barat, Plono Timur, Nglingga Timur, Nglingga Barat, Gegerbajing, Kemesu, Kalirejo Utara, Kalirejo Selatan, Kalinongko, Jetis, Beteng, Suren, dan Mendolo.

Batasan wilayah kalurahan Pagerharjo: Utara berbatas langsung dengan Desa Paripurna, Salaman, Magelang, Sedayu, Loano, dan Purworejo. Selatan berbatas dengan Desa Pucungroto dan Kaligesing di Kabupaten Purworejo. Sementara di barat, Desa Sedayu dan Loano juga termasuk dalam Kabupaten Purworejo. Di timur, Kalurahan Pagerharjo berbatasan dengan Desa Ngargosari dan Desa Banjarsari, yang berada di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 1: Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	2210	2278
2	PNS	28	10
3	Pedagang	10	15
4	Perawat swasta	-	4
5	TNI	3	-
6	POLRI	12	-
7	Pengusaha kecil dan menengah	40	14
8	Dukun kampung terlatih	-	3
9	Jasa pengobatan alternatif	2	-
10	Dosen swasta	1	-
11	Pengusaha besar	5	-
12	Seniman	1	-
13	Kary. Perusahaan swasta	185	108
14	Kary. Perusahaan pemerintah	58	55
15	TKI	1	-

Sumber: Data sekunder kalurahan Pagerharjo

Dari data di atas menunjukkan kalurahan Pagerharjo memiliki beragam jenis pekerjaan dengan distribusi yang menunjukkan adanya variasi dalam sektor ekonomi dan profesional. Petani merupakan jenis pekerjaan yang paling dominan di Pagerharjo, dengan jumlah laki-laki (2210) dan perempuan (2278) yang terlibat dalam profesi ini. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian adalah kegiatan utama dan signifikan dalam perekonomian lokal. PNS (Pegawai Negeri Sipil) ada sejumlah kecil pegawai negeri sipil di kalurahan Pagerharjo dengan laki-laki (28) dan perempuan (10). Ini menunjukkan bahwa pekerjaan di sektor publik relatif minoritas dibandingkan dengan sektor lain.

Jumlah pedagang laki-laki (10) dan perempuan (15) menunjukkan adanya kegiatan perdagangan, meskipun jumlahnya tidak besar dibandingkan dengan sektor pertanian.

Perawat swasta terdapat sedikit perawat swasta perempuan (4), menunjukkan adanya layanan kesehatan non-pemerintah di daerah ini. TNI dan POLRI, anggota TNI (3 laki-laki) dan POLRI (12 laki-laki) menunjukkan keterlibatan dalam sektor keamanan, tetapi tidak ada perempuan yang terdaftar dalam profesi ini di kalurahan Pagerharjo. Pengusaha Kecil dan Menengah, terdapat sejumlah pengusaha kecil dan menengah, dengan laki-laki (40) dan perempuan (14). Ini menandakan adanya aktivitas kewirausahaan di kalurahan ini. Dukun Kampung Terlatih, ada beberapa perempuan (3) yang bekerja sebagai dukun kampung terlatih, menunjukkan adanya kepercayaan dan praktik pengobatan tradisional di kalurahan Pagerharjo. Jasa Pengobatan Alternatif, hanya ada sedikit laki-laki (2) yang terlibat dalam jasa pengobatan alternatif, menandakan bahwa sektor ini relatif kecil di kalurahan Pagerharjo.

Dosen Swasta, hanya ada satu laki-laki yang berprofesi sebagai dosen swasta, menunjukkan bahwa pekerjaan di sektor pendidikan tinggi swasta tidak banyak diminati. Pengusaha Besar, ada sedikit pengusaha besar (5 laki-laki), menunjukkan bahwa sektor bisnis besar belum berkembang di kalurahan Pagerharjo. Seniman, hanya ada satu laki-laki yang terdaftar sebagai seniman, menandakan bahwa seni mungkin bukan bagian utama dari ekonomi lokal. Karyawan Perusahaan Swasta dan Pemerintah, terdapat lebih banyak karyawan perusahaan swasta (185 laki-laki dan 108 perempuan) dibandingkan dengan karyawan perusahaan pemerintah (58 laki-laki dan 55 perempuan), menunjukkan bahwa sektor swasta lebih dominan di kalurahan Pagerharjo. TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ada satu laki-laki yang bekerja sebagai TKI, menunjukkan adanya emigrasi tenaga kerja dari kalurahan Pagerharjo. Secara keseluruhan, Pagerharjo adalah kalurahan dengan basis ekonomi yang kuat di sektor pertanian, diikuti oleh sektor swasta dan perdagangan. Pekerjaan di sektor publik dan bisnis besar relatif kecil, sedangkan terdapat juga keterlibatan dalam sektor kesehatan, kewirausahaan, dan pengobatan alternatif.

2. Pembahasan

Menurut Kurniyati, (2019) partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa sangat krusial untuk memastikan bahwa proses pembangunan desa berlangsung dengan efektif. Kurniyati menyebutkan ada 4 (empat) tahapan dalam strategi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1), partisipasi dalam perencanaan pembangunan, (2) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, (3) partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan, dan (4) partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan.

Menurut (Purwaningsih, 2008) partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat diwujudkan dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam segi sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat juga membantu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat solidaritas dan kualitas hidup di desa. Partisipasi dalam pembangunan desa dapat dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, baik kepala keluarga, perempuan, dan remaja.

Saragih, (2021) menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk dukungan yang signifikan terhadap berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Partisipasi ini tidak hanya sekadar pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup keterlibatan mereka dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah dilakukan oleh masyarakat Kalurahan Pagerharjo dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi:

2.1 Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

a. Aspirasi masyarakat

Menurut Beda & Supardal, (2022), tahapan perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam sebuah proses. Perencanaan berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di masa

depan. Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari peran dan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan yang baik mencerminkan peran aktif masyarakat dalam mendukung program/proyek pemerintah.

Partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam tahap ini adalah agar masyarakat tidak hanya sekedar mengusulkan kegiatan proyek pembangunan, tetapi juga mampu menggali, memahami, dan menyampaikan masalah yang sebenarnya mereka hadapi. Hal ini sejalan dengan pendapat Devis (Deviyanti, 2013), partisipasi masyarakat adalah suatu fenomena psikologis yang melibatkan keterlibatan baik secara mental maupun emosional. Partisipasi masyarakat tidak hanya menyampaikan ide dan gagasan tetapi mampu menggali, memilih dan melaksanakan dalam bentuk tindakan nyata.

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang dilakukan di Kalurahan Pagerharjo seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa kalurahan memberikan hak dan kebebasan kepada masyarakat dalam menyampaikan ide dan gagasan. Pemerintah kalurahan dalam hal ini memberikan kepercayaan kepada kepala Dukuh selaku koordinator wilayah, kemudian Dukuh dibantu oleh ketua RT sebagai pelaksana di lapangan. Usulan-usulan yang diserapkan oleh ketua RT dimusyawarahkan di Dukuh bersama masyarakat untuk menentukan program prioritas. Program yang dimaksud adalah program yang dikategorikan sebagai kepentingan dalam khalyak orang banyak dan mempunyai kemanfaatan dalam jangka waktu yang panjang.

Adapun hasil wawancara di lapangan yang menjelaskan bahwa dalam penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh ketua RT dengan cara musyawarah bersama warga setempat dalam mencapai kesepakatan bersama. Usulan-usulan yang kemudian dibawa ke dalam musyawarah Dukuh untuk disaring kembali. Setelah dilakukan musyawarah Dukuh, aspirasi dari masyarakat kemudian dibawa ke dalam musyawarah kalurahan.

b. Musyawarah desa

Musyawarah kalurahan atau yang biasa disebut musrenbangkal adalah puncak tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas program pembangunan kalurahan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbangkal merupakan bagian dari tahapan yang ada di Kalurahan Pagerharjo dalam perencanaan pembangunan.

Menurut Hadawiya et al., (2021), partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa sangat krusial untuk menentukan keberhasilan suatu program. Tanpa keterlibatan masyarakat, Musrenbang desa tidak akan berjalan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi landasan dasar pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, sehingga pelaksanaan Musrenbang tidak dapat dipisahkan dari partisipasi aktif masyarakat.

Kalurahan Pagerharjo merupakan kalurahan yang setiap tahunnya melaksanakan musrenbangkal untuk menyusun RKP. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dalam penyusunannya untuk menentukan pembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan musrenbang kalurahan memerlukan partisipasi aktif masyarakat secara langsung, karena tahapan ini adalah yang paling penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, proses partisipasi masyarakat dalam musrenbangkal sangat aktif. Ini tidak terlepas dari peran yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam mengikutsertakan masyarakat dalam musrenbangkal. Sebelum kegiatan musrenbangkal diselenggarakan, pemerintah kalurahan mengedarkan surat undangan yang disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini terlihat dalam presensi kehadiran peserta musrenbang di Kalurahan Pagerharjo, yang terdiri dari pamong kalurahan, Dukuh dan tokoh masyarakat. Peserta yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) turut memberikan masukan mengenai berbagai usulan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan skala prioritas.

Usulan-usulan tersebut kemudian diajukan kepada pihak pemerintah untuk dipertimbangkan.

Dengan memberikan masukan yang konstruktif, peserta musyawarah dapat memastikan bahwa prioritas pembangunan yang diajukan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Proses ini tidak hanya memperkuat dasar perencanaan, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Keterlibatan aktif ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga hasil pembangunan menjadi lebih efektif dan relevan dengan kondisi di lapangan.

2. 2 Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Ibori, (2004), partisipasi tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat desa yang sangat berpotensi untuk dioptimalkan dalam proses pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu sikap yang muncul secara sadar dalam diri masyarakat, dimana mereka menyadari hak untuk memiliki dan menikmati hasil pembangunan. Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada. Dengan berpartisipasi, masyarakat turut berkontribusi dalam mendukung upaya pemerintah desa secara umum dalam proses pembangunan.

Menurut Mono & Samaloisa, (2022) pembangunan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pembangunan di Kalurahan Pagerharjo didominasi oleh pembangunan fisik. Pelaksanaan pembangunan fisik/infrastruktur di Kalurahan Pagerharjo dilaksanakan pemerintah desa dengan sumber dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo, juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) kalurahan. Keterlibatan masyarakat di Kalurahan Pagerharjo dalam mendukung pembangunan fisik tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam berbagai proyek dan kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekitar. Banyak warga yang terlibat melalui gotong royong, menyumbangkan tenaga dan waktu mereka. Misalnya dalam proyek pembangunan jalan pedesaan, mereka datang dengan membawa alat-alat sederhana dan bekerja sama untuk meratakan tanah, menggali, atau mengangkut material yang dapat mereka kerjakan. Keterlibatan ini juga tidak memandang gender, baik itu perempuan dan laki-laki sama dalam kontribusi pelaksanaan kegiatan. Namun, tidak sedikit juga yang hanya memberikan dukungan dalam bentuk konsumsi, seperti makanan dan minuman untuk para pelaksana kegiatan.

Disisi lain, ada beberapa masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi dalam gotong-royong ini, sering kali disebabkan oleh keterbatasan waktu akibat kesibukan pekerjaan mereka. Biasanya masyarakat yang belum sempat hadir dalam kegiatan gotong-royong pembangunan, mereka berinisiatif menyumbangkan bantuan berupa material ataupun dana, dan itu bukan paksaan ataupun perintah desa, tetapi itu bentuk partisipasi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk sumbangan dana yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan akan memiliki dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan hasil dari pembangunan itu sendiri sebab dengan ikut terlibatnya mereka dalam memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan dana maka akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab moral terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

2. 3 Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan

Masyarakat memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan yang merupakan hasil jerih payah bersama. Pemerintah daerah/desa dalam penyediaan ruang dan waktu harus secara adil dan merata. Partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan dapat dilihat dari kemanfaatan pembangunan. Menurut Deviyanti, (2013), partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan dapat dianalisis dari tiga aspek, yaitu manfaat material, manfaat sosial, dan manfaat pribadi.

Pembangunan yang dihasilkan dari aspirasi masyarakat akan lebih bermanfaat dan memiliki daya guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pembangunan yang terus berkelanjutan di Kalurahan Pagerharjo akan menjadi manfaat yang sangat positif untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa pembangunan yang dilakukan di Kalurahan Pagerharjo memberikan dampak positif yang signifikan bagi seluruh warga. Pembangunan fisik menjadi fondasi penting yang memungkinkan masyarakat untuk merasakan manfaat secara langsung.

Salah satu aspek yang paling terlihat adalah pembangunan jalan pedesaan dan jalan pertanian. Dengan adanya jalan yang baik, aksesibilitas warga ke berbagai lokasi, seperti pasar dan fasilitas umum, meningkat drastis. Hal ini tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi, terutama bagi petani yang lebih mudah menjual hasil pertanian mereka. Jembatan yang dibangun di Kalurahan Pagerharjo juga memainkan peranan vital. Jembatan ini menghubungkan berbagai wilayah, memungkinkan warga untuk beraktivitas dengan lebih lancar, terutama saat musim hujan ketika sungai sering meluap. Dengan adanya jembatan, risiko terputusnya akses transportasi dapat diminimalisir, sehingga kegiatan sosial dan ekonomi tetap berjalan tanpa hambatan. Selain infrastruktur transportasi, pembangunan gedung sekolah, gedung olahraga, dan pasar desa juga merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Gedung sekolah yang layak menyediakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak-anak, sementara gedung olahraga menjadi tempat bagi masyarakat untuk berolahraga dan mengadakan berbagai kegiatan sosial. Juga pasar sempulur yang memainkan peran penting dalam pemasaran produk lokal hasil pertanian. Ketiganya mendukung perkembangan pendidikan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan yang merupakan aspek krusial dalam menciptakan warga yang lebih baik. Balai pertemuan yang dibangun di Kalurahan Pagerharjo juga berfungsi sebagai ruang untuk berkumpul dan berdiskusi, memperkuat ikatan sosial antarwarga. Tempat ini sering digunakan untuk pertemuan komunitas, acara budaya, dan kegiatan sosial lainnya, yang mempererat rasa kebersamaan di antara masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kalurahan Pagerharjo tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat bagi perkembangan sosial dan ekonomi di masa depan. Dengan semua fasilitas yang ada, warga Kalurahan Pagerharjo semakin mampu meningkatkan kualitas hidup mereka dan berkontribusi pada kemajuan komunitas secara keseluruhan.

2.4 Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan

Menurut Rahmadi & Setiawati, (2020), evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan menilai berhasil atau tidaknya suatu program yang sudah dilakukan. Evaluasi sebagai kunci dalam menilai keberhasilan pembangunan, menjadi suatu acuan untuk mengubah/berinovasi pada kemanfaatan. Hal ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat yang juga sebagai pengguna fasilitas untuk turut dalam meninjau pembangunan yang ada. Sehingga masukan ataupun saran yang diberikan masyarakat dapat menjadi acuan pemerintah dalam menyusun program pada tahun berikutnya.

Cohen dan Uphoff (Andreeyan, 2014), tingkatan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan tercermin dalam keterlibatan mereka untuk menilai dan mengawasi kegiatan serta hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi hasil pembangunan di Kalurahan Pagerharjo dilakukan dengan maksimal. Masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam proses pembangunan, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam penilaian terhadap berbagai proyek yang telah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat terlihat melalui berbagai forum yang diadakan oleh pemerintah desa, warga diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan mengenai hasil pembangunan.

Kalurahan Pagerharjo melakukan pertemuan rutin sebagai wadah untuk masyarakat dapat menyampaikan pendapat mereka tentang infrastruktur yang telah dibangun, seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, gedung olahraga, pasar dan fasilitas umum lainnya. Proses ini menjadi bagian penting bagi pemerintah dan masyarakat Pagerharjo dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang relevan untuk pembangunan yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pendapat Adi, (2007), partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan potensi yang ada di komunitas, pemilihan serta pengambilan keputusan mengenai solusi alternatif untuk mengatasi masalah, pelaksanaan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, dan keterlibatan dalam evaluasi perubahan yang terjadi.

Masyarakat juga secara langsung mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan, memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan cara ini tentu warga merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil pembangunan dan berkomitmen untuk menjaga serta memeliharanya. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Masyarakat merasa lebih dihargai dan didengar, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, umpan balik yang diberikan oleh warga sangat berharga bagi pemerintah dalam merencanakan program pembangunan selanjutnya, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. 5 Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan Pagerharjo

Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan atau kemajuan, baik itu individu maupun kelompok, baik itu organisasi maupun pemerintah. Munculnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh adanya kemauan dari masyarakat untuk memperoleh tarap hidup yang baik. Tarap hidup yang baik tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat. Hal ini kemudian menjadi motorik penggerak partisipasi masyarakat Kalurahan Pagerharjo dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan menjadi media utama dalam mempercepat mobilisasi masyarakat, terutama masyarakat sebagai pribumi. Sehingga kemauan mereka sangat tinggi untuk memajukan daerahnya dengan cara ikut terlibat dalam percepatan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, faktor utama yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah komitmen dari pemerintah dan dukungan anggaran (Dana Desa). Sejalan dengan yang disampaikan Samaun et al., (2022) yang menyebutkan bahwa dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pembangunan, komitmen pemerintah sangat penting. Pemerintah secara aktif melibatkan masyarakat dalam peran serta, didukung oleh sikap gotong royong dan kepedulian masyarakat yang ada.

Hasil wawancara penelitian dengan narasumber menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh kesadaran individu atau kelompok dalam mengupayakan pembangunan daerah yang lebih baik. Kesadaran ini bukan hanya muncul begitu saja, tetapi sering kali dipicu oleh faktor-faktor tertentu, seperti pendidikan, pengalaman sebelumnya, dan interaksi sosial yang positif.

Di kalurahan Pagerharjo, setiap kali ada kegiatan pembangunan, baik Kepala Lurah maupun pamong kalurahan selalu menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk terlibat. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengatur atau mandor, tetapi juga aktif turun langsung ke lapangan, berbaur dengan masyarakat. Dalam setiap kegiatan, baik itu pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas umum, atau program pemberdayaan masyarakat, mereka hadir untuk memberikan dukungan dan motivasi. Keberadaan pemimpin kalurahan yang peduli dan aktif ini memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah kalurahan mereka berkomitmen untuk terlibat langsung, hal ini menumbuhkan rasa kepercayaan dan kepedulian. Masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk ikut serta dalam berbagai

kegiatan pembangunan, karena mereka merasa bahwa usaha mereka akan dihargai dan didukung oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada kehadiran fisik, tetapi juga mencakup kontribusi ide, tenaga, dan sumber daya. Misalnya, dalam kegiatan pembangunan jalan desa, masyarakat sering kali menggalang dana secara swadaya dan menyediakan tenaga kerja untuk membantu proses pembangunan. Hal ini mencerminkan rasa memiliki yang kuat terhadap daerah mereka dan keinginan untuk melihat kemajuan yang nyata. Keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan hasil kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

2. 6 Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan Pagerharjo

Faktor penghambat adalah segala cara atau sesuatu yang bisa menggagalkan, menunda dan menghalang rencana/tujuan. Wastiti et al., (2021) Faktor penghambat adalah elemen negatif yang memengaruhi masyarakat dan menghalangi partisipasi mereka. Hal ini dapat berdampak buruk dan mengurangi keterlibatan masyarakat. Faktor penghambat partisipasi masyarakat Kalurahan Pagerharjo dalam pembangunan adalah Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, informasi yang diberikan oleh narasumber yang menyebutkan bahwa rendahnya sumber daya manusia sangat menyebabkan proses partisipasi dalam pembangunan. SDM yang belum memumpuni di Kalurahan Pagerharjo menjadi indikator dalam keterlibatan pembangunan. Karenanya mereka belum secara maksimal dalam menterjemah arti pembangunan itu sendiri. Seperti yang disampaikan Soedarno, (Deviyanti, 2013), faktor pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, serta untuk memahami dan melaksanakan berbagai tingkat dan bentuk partisipasi yang tersedia.

Di Kalurahan Pagerharjo, tantangan dalam pembangunan sangat terlihat, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Salah satu faktor kunci adalah ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa tersebut. Banyak warga yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proyek pembangunan yang direncanakan. Akibatnya, upaya untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat menjadi terhambat. Di sisi lain, masyarakat Pagerharjo juga menghadapi kendala dalam memahami berbagai bentuk partisipasi yang diperlukan. Dalam banyak kasus, mereka hanya diberikan penjelasan yang terlalu teknis atau tidak relevan dengan kondisi sehari-hari mereka. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengaplikasikan gagasan-gagasan yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan atau sosialisasi yang diadakan. Misalnya, saat ada pelatihan tentang pengelolaan dana desa, banyak warga yang tidak dapat mengikuti dengan baik karena kurangnya pemahaman tentang sistem keuangan.

Selain pengaruh SDM di Kalurahan Pagerharjo, anggaran yang minim juga menjadi faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat. Ketika dana yang tersedia terbatas, pemerintah desa sering kali kesulitan untuk mengimplementasikan program-program yang melibatkan masyarakat secara maksimal. Keterbatasan anggaran ini mengakibatkan kurangnya fasilitas dan pelatihan yang dibutuhkan, sehingga masyarakat merasa kurang siap untuk berkontribusi secara aktif. Proyek pembangunan yang direncanakan menjadi terbatas dan tidak dapat menjangkau semua kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dari warga terhadap proses pembangunan, sehingga partisipasi mereka pun menurun. Masyarakat mungkin merasa bahwa suara dan kebutuhan mereka tidak terakomodasi, yang pada akhirnya mengurangi motivasi mereka untuk terlibat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kalurahan Pagerharjo mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat digaribawahi. Pertama, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan ini dapat diukur melalui berbagai tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, serta evaluasi hasil pembangunan. Partisipasi ini mencerminkan keterlibatan warga dalam proses yang ada, mulai dari awal hingga akhir, dan merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan suatu proyek pembangunan.

Peneliti mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal faktor pendukung, terdapat dua elemen utama yang krusial. Pertama, komitmen pemerintah Kalurahan untuk memajukan Pagerharjo terlihat jelas dalam tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah. Keterlibatan aktif mereka dalam proyek pembangunan menjadi pendorong motivasi bagi warga untuk berpartisipasi. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan kondisi Kalurahan, mereka cenderung merasa lebih tergerak untuk ikut serta dalam proses tersebut. Kedua, dukungan anggaran dan sikap pemerintah desa yang transparan serta akuntabel dalam pengelolaan Dana Desa (DD) turut berperan penting. Ketika warga mengetahui bahwa dana yang ada dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan bersama, mereka akan lebih percaya dan merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan. Transparansi ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan di antara masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi mereka.

Namun, di balik faktor pendukung tersebut, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Pertama, rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di desa menjadi salah satu kendala utama. Banyak warga yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk berpartisipasi secara optimal. Hal ini mengakibatkan keterlibatan mereka dalam pembangunan tidak maksimal, karena mereka tidak sepenuhnya memahami peran yang dapat mereka mainkan. Kedua, minimnya alokasi Dana Desa juga menjadi penghambat signifikan. Anggaran yang tidak memadai sering kali tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat warga merasa bahwa partisipasi mereka tidak memiliki dampak yang signifikan, karena proyek yang direncanakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Keterbatasan dana ini juga berpengaruh pada pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat, yang sangat penting untuk meningkatkan partisipasi.

E. Referensi

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP IU Press.
- Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 2(4), 1940.
- Beda, P. D., & Supardal, S. (2022). Pengelolaan Desa Wisata Srikeminut Di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 174–182. <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i1.44>
- Deviyanti, D. (2013). *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Kecamatan Balikpapan Tengah*. 1(2), 380–394.
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Community Participation in Village Development Planning Deliberation*. 3(September), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Huberman, M. B. M. A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*.
- Ibori, A. (2004). *Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa tembuni distrik tembuni kabupaten teluk bintuni*.
- Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 56. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023>
- Kurniyati, Y. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1*

Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

- Mono, A., & Samaloisa, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 113–121. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.259>
- Purwaningsih, E. (2008). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).605 *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Ernawati Purwaningsih*, 3(112).
- Rahmadi, & Setiawati, B. (2020). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Jalan Usaha Tani Desa Kandris Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur. *Japb*, 3(2), 1225–1239.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18–33. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>
- Undang Dasar 1945. (1945). *Indonesia*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (1999). *Indonesia*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Indonesia*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (1999). *Indonesia*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2024). *Indonesia*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. (1974). *Indonesia*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Wastiti, A., & Hartuti Purnaweni, A. Z. R. (2021). Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(4), 130-143., Vol 10, No.